

**KOLABORASI KINERJA DESA ADAT DAN PERAN BUMDES DALAM  
MENJALANKAN PROGRAM WISATA TERPADU TAMAN MUMBUL**

**Juli Saptaputra Hantana,**

Program Studi Magister Administrasi Publik,  
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia,  
[juli\\_sapta@hotmail.com](mailto:juli_sapta@hotmail.com);

**Ni Luh Putu Eddy Tarini,**

Program Studi Magister Administrasi Publik,  
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia;

**Ni Nengah Sarikumpul,**

Program Studi Magister Administrasi Publik,  
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia;

**Ni Ketut Riyastini,**

Program Studi Magister Administrasi Publik,  
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia;

**Tjatur Ermitajani Judi**

Program Studi Magister Administrasi Publik,  
Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia.

**ABSTRACT**

It is important to develop and manage a tourism village considering that the village is rich in tourism potential, natural, has not undergone many changes and maintains its authenticity so it popular among tourists. Bali as a tourism destination for both domestic and foreign tourists have a variety of tourism potentials, one of them is Taman Mumbul in Sangeh Village, Badung. Taman Mumbul offers natural, cultural and spiritual tourism including water tourism because Taman Mumbul has abundant water sources. The management of Taman Mumbul is completely done by Desa Adat Sangeh with a minimal role from Desa Dinas through BUMDes, although the two entities have the authority as stipulated in the applicable laws and regulations. This journal aims to analyze the role of Desa Adat and BUMDes in managing village tourism through participatory action research (PAR) methods and similar reviewer research so that collaborative forms of Desa Adat performance roles and the role of BUMDes can be obtained to implement Taman Mumbul integrated tourism program. The results illustrate that the establishment of a tourism business unit for the management of Taman Mumbul in BUMDes Desa Sangeh can initiate the collaboration and accompanied by adopting the best strategy that has been carried out successfully by BUMDes in tourist villages both in Bali and outside Bali, besides that a strategic partnership is needed between Desa Adat, BUMDes and stakeholders, namely academia, business, community, government and media based on the principles of mutual trust, openness, mutual need and mutual benefit so that tourism development in

Taman Mumbul will be more optimal and can be carried out in a sustainable manner.

**Keywords:** *Tourism Village; Taman Mumbul; Desa Adat Sangeh; BUMDes; Collaboration*

### **ABSTRAK**

Pengembangan dan pengelolaan desa wisata penting dilakukan mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami, belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan. Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara memiliki beragam potensi wisata yang salah satunya adalah obyek wisata Taman Mumbul di Desa Sangeh kabupaten Badung. Taman Mumbul menawarkan jenis wisata alam, budaya, dan spiritual termasuk wisata air karena Taman Mumbul memiliki sumber air yang melimpah. Pengelolaan Taman mumbul sepenuhnya dilakukan oleh desa adat sangeh dengan peran yang minim dari desa dinas melalui BUMDes, walaupun kedua entitas tersebut memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana peran desa adat dan BUMDes dalam melakukan pengelolaan desa wisata melalui metode participatory action research (PAR) dan reviewer research sejenis sehingga dapat diperoleh bentuk kolaborasi peran kinerja desa adat dan peran BUMDes dalam menjalankan Program wisata terpadu Taman Mumbul. Hasil yang diperoleh menggambarkan pembentukan unit usaha wisata untuk pengelolaan taman mumbul pada BUMDes desa sangeh dapat menjadi langkah awal kolaborasi yang disertai dengan mengadopsi strategi terbaik yang telah dilakukan dengan sukses oleh BUMDes di desa wisata baik di Bali maupun di luar Bali, selain itu diperlukan adanya kemitraan strategis antara desa adat, BUMDes dan para stakeholder yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media yang didasari asas saling percaya, keterbukaan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan sehingga pengembangan pariwisata taman mumbul akan menjadi lebih optimal dan dapat berjalan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Desa wisata; Taman Mumbul; Desa Adat Sangeh; BUMDes; Kolaborasi*

### **A. PENDAHULUAN**

Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi salah satu komitmen pemerintah yang termuat dalam Nawacita ketiga<sup>1</sup>. Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak pihak berharap besar, terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianaktirikan. Sikap Pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program

---

<sup>1</sup> Humas Setkab. (2019, Juni 24). Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa. Diakses pada <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>

pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Salah satu pemanfaatan pengalokasian dana desa adalah untuk pengembangan dan pengelolaan desa wisata, iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi desa, sekaligus sebagai aset desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di desa. Pengelolaan pariwisata di desa penting dilakukan mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami, belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan dan berbicara mengenai pariwisata tentunya tidak terlepas dari pulau Bali yang saat ini sedang berupaya bangkit setelah dua tahun belakangan terpukul akibat pandemi COVID-19.

Dari sekian banyak desa wisata yang tersebar di Bali, desa wisata sangeh yang terletak di Kabupaten Badung memiliki beragam potensi wisata yang salah satunya adalah obyek wisata Taman Mumbul. Kawasan wisata Taman Mumbul merupakan sebuah kawasan hijau yang masih alami yang menjadi salah satu potensi wisata alam yang dimiliki, jenis wisata lainnya antara lain wisata budaya dan spiritual yang menawarkan ritual penyucian diri atau melukat yang banyak menarik wisatawan untuk berkunjung, serta wisata air karena Taman Mumbul memiliki sumber air yang melimpah salah satunya adanya kolam besar yang dihuni oleh ribuan ikan. Masyarakat Desa Wisata Sangeh sendiri menganggap bahwa Taman Mumbul merupakan tempat suci dan juga tempat bagi umat Hindu untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti Upacara Melasti. Taman Mumbul sering dikunjungi oleh wisatawan yang menyukai suasana yang tenang dan nyaman karena Taman Mumbul juga berlokasi cukup jauh dari jalan raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendesa adat Sangeh, Taman Mumbul terbagi menjadi tiga bagian yaitu Utama Mandala sebagai area suci yang digunakan untuk upacara keagamaan, Madya Mandala yang digunakan untuk aktivitas melukat, yoga serta pertunjukan seni karena terdapat wantilan serta Nista Mandala di bagian paling selatan yang akan dikembangkan untuk kolam renang di masa mendatang. Terdapat beberapa aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di taman mumbul dalam kaitannya dengan upacara agama Hindu seperti melakukan persembahyangan di Pura Taman Sari, melaksanakan melasti sebelum Hari Raya Nyepi di sumber mata air murni (klebutan) di hulu dekat Pura Taman Sari, menggunakan air di pertemuan saluran air di hilir telaga besar sebagai pelengkap upacara pitra yadnya (pengabenan) serta adanya pohon beringin besar di tengah halaman Taman Mumbul yang digunakan sebagai pelengkap sarana ritual upacara agama Hindu. Selain berkaitan dengan upacara keagamaan, Taman Mumbul juga digunakan sebagai ajang kreativitas masyarakat terkait pemanfaatan lingkungan dan pelestarian alam dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya seperti pelaksanaan lomba memancing yang melibatkan komunitas, masyarakat sekitar sekaligus sebagai ajang pertemuan kelompok-kelompok masyarakat, melakukan sesi prewedding dengan memanfaatkan keindahan kolam dengan latar belakang bangunan pura ditengah kolam, shooting film, aktivitas berdagang bagi

masyarakat sekitar dan luar desa sangeh ketika perayaan hari besar agama hindu (galungan dan kuningan, sehari setelah nyepi) maupun libur nasional sebagai penunjang kebutuhan rekreasi, serta pelaksanaan kegiatan yoga dari berbagai kelompok baik lokal sampai ke mancanegara karena tempat ini dipercaya memiliki nilai religius.

Berdasarkan penuturan dari pengelola taman mumbul, pengelolaan taman mumbul termasuk potensi-potensi wisata yang dimiliki serta berbagai aktifitas didalamnya sepenuhnya dilakukan oleh desa adat sangeh dengan sangat sedikit bahkan dapat dikatakan minim campur tangan dari desa dinas dalam hal ini BUMDes yang dimiliki oleh desa sangeh. Desa dinas hanya terlibat dalam kebersihan kawasan taman mumbul dan pengajuan proposal atau usulan ketika akan dilakukan pembangunan sarana/prasarana penunjang ke pemerintah. Pengelolaan taman mumbul oleh desa adat melalui pengelola memang telah menyerap masyarakat untuk menggerakkan kepariwisataan antara lain dengan masuknya kelompok masyarakat desa sangeh dalam perangkat pelaksana pengelola taman mumbul, namun hal tersebut masih belum maksimal jika dibandingkan dengan keseluruhan masyarakat yang ada ditambah kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola potensi wisata serta permasalahan anggaran menjadi kendala dalam pengelolaan tersebut. Di lain pihak desa dinas melalui BUMDes yang dimiliki belum memiliki peran dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata Taman Mumbul, BUMDes sejatinya diharapkan dapat melakukan pengelolaan potensi wisata secara efektif dan memberdayakan masyarakat secara langsung karena memiliki struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana yang akan menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Baik desa adat maupun BUMDes memiliki kewenangan dalam mengelola desa wisata atau potensi wisata di desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, oleh karena itu dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana peran desa adat dan BUMDes dalam melakukan pengelolaan desa wisata baik di Bali maupun di luar Bali sehingga dapat diperoleh bentuk kolaborasi peran kinerja desa adat dan peran BUMDes dalam menjalankan Program wisata terpadu Taman Mumbul untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan taman mumbul saat ini serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan obyek wisata taman mumbul di masa mendatang yang akan membawa dampak positif pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa sangeh. Solusi tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan dan wacana yang mendalam bagi para pengelola Taman Mumbul, desa sangeh yang memiliki kekhasannya sendiri. Penulis sangat terbuka jika para pengelola obyek wisata Taman Mumbul kelak akan melaksanakan usulan program atas solusi ini, dengan demikian dapat dilihat dan dikomparasi dengan tepat tujuan dan makna dari penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat dengan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan PKM dengan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan<sup>2</sup>. Kunci untuk PAR adalah namanya, konsep partisipasi dan tindakan membentuk dasar-dasar metode. Tindakan yaitu sekedar mencari tahu mencakup riset, dimana riset juga hendaknya melibatkan komponen aksi yang berupaya menghasilkan perubahan positif. Partisipasi menjelaskan riset sebagai proses partisipasi yang menuntut kesetaraan dan kolaborasi dari minat masyarakat untuk riset. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa PAR adalah bentuk kegiatan penelitian atau suatu riset berupa adanya aksi yang melibatkan beberapa komponen untuk bersama berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencapai suatu perubahan yang positif. PAR terdiri dari tiga kata yang selalu berhubungan seperti daur (siklus), yaitu partisipasi, riset, dan aksi. Artinya hasil riset yang telah dilakukan secara partisipatif kemudian diimplementasikan kedalam aksi. Bagian aksi dari PAR adalah situasional dalam upaya untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan juga terletak di dalam dan dengan kepentingan masyarakat. Aksi yang didasarkan pada riset partisipatif yang benar akan menjadi tepat sasaran. Sebaliknya, aksi yang tidak memiliki dasar permasalahan dan kondisi subyek penelitian yang sebenarnya akan menjadi kontraproduktif. Namun, setelah aksi bukan berarti lepas tangan begitu saja, melainkan dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi yang kemudian menjadi bahan untuk riset kondisi subyek penelitian setelah aksi. Begitu seterusnya hingga kemudian menjadi sesuatu yang tetap. Dalam sistematika penulisannya metode PAR ini serupa dengan penelitian pendekatan kualitatif pada umumnya yaitu menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan eksplorasi sasaran penelitian ini, supaya mendapatkan keutuhan akan permasalahan dan perumusan solusi nantinya.

Selain menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) sebagai penunjang, dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung. Penelitian Pustaka adalah penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Pada penelitian ini objek data yang dicari adalah literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian Pustaka akan memberikan kacamata yang berbeda atas perbedaan pola pandang antar Peneliti, hal ini tentu sangat menarik bagi Peneliti untuk mengembangkan temuan dari hasil peneliti terdahulu dengan kesamaan obyek dan sasaran. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang

---

<sup>2</sup> Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 422

sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan. Terdapat empat kegiatan pada penelitian kepustakaan<sup>3</sup> yaitu: (1) mencatat semua temuan mengenai “masalah penelitian” pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai “masalah penelitian tersebut”, (2) memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru, (3) menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya dan (4) mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap “masalah penelitian”. Sumber data yang digunakan yaitu data primer mengenai pengelolaan Taman Mumbul yang didapat dari wawancara dengan pengelola dan pengurus Desa Adat Sangeh sedangkan data sekunder yaitu jurnal, buku ilmiah dan sumber yang diperoleh dari internet yang memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Desa Adat Sangeh dalam pengelolaan Taman Mumbul**

Obyek wisata Taman Mumbul merupakan salah satu potensi wisata desa sangeh yang didesain untuk mendampingi keberadaan Pura Ulun Mumbul dengan area yang hijau, indah dan asri. Berjarak sekitar 500 meter dari Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh, Taman Mumbul memiliki sebuah kolam besar atau telaga di bagian sebelah selatan Pura yang menawarkan pemandangan yang alami dan dimanfaatkan sebagai sumber air serta menjadi kolam pancing bagi wisatawan yang berkunjung karena memiliki ribuan ikan dan tanaman kapu-kapu. Air yang terus mengalir sepanjang tahun, kegiatan ritual, pemandangan yang sangat menarik, bentuk bangunan tradisional Bali, keasrian alam, lingkungan yang sangat cocok untuk yoga, adat dan tradisi yang masih dilestarikan serta posisi strategis yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar merupakan potensi utama dari Taman Mumbul<sup>4</sup>

Untuk mengelola seluruh potensi yang dimiliki Taman Mumbul sepenuhnya dilakukan oleh Desa Adat melalui Pengelola Taman Mumbul sedangkan Desa Dinas hanya berperan ketika terdapat pengajuan proposal untuk melakukan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana penunjang serta terkait kebersihan kawasan taman mumbul<sup>5</sup>. Hal ini sejalan dengan pengelolaan obyek wisata yang ada di Desa Sangeh sebagai usaha masyarakat Desa yang sepenuhnya di kelola oleh lembaga Desa Pekraman Sangeh yang berbasis masyarakat dengan

---

<sup>3</sup> Mirshad, Z. (2014). *Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi*. Surabaya: Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>4</sup> Beoang, D. D., & Suryasih, I. A. (2018). *Identifikasi Potensi Desa Wisata Sangeh, Kabupaten Badung*. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2)

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sangeh pada saat kunjungan ke Taman Mumbul tanggal 17 Desember 2022

memberdayakan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development paradigm*), hal tersebut dikarenakan masyarakat memainkan peran penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari ketidakmampuan pada segi ekonomi, keterbelakangan dan kesenjangan. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal yang ikut berperan dalam mengelola Taman Mumbul, perangkat pengelola Taman Mumbul seperti ketua pengelola, sekretaris, bendahara, staff dan petugas keamanan yang bekerja seluruhnya merupakan masyarakat desa sangeh dengan jumlah total sebanyak 20 orang<sup>6</sup>.

Sistem pengelolaan yang dilakukan mengacu pada UU Kepariwisata Indonesia, implemetasi pengelolaan berdasarkan aturan yang telah dituangkan oleh pemerintah Kabupaten Badung bersama instansi yang terkait tentang pengelolaan obyek wisata, Perda tentang pariwisata budaya dan lingkungan serta Aturan Desa Adat berdasarkan keputusan bersama warga Desa Pekraman Sangeh seperti, awigawig, perarem desa dan lain sebagainya. Kewenangan Desa Adat dalam pengelolaan desa wisata tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019, melalui Perda Desa Adat sudah jelas disebutkan bahwa Desa Adat memiliki kewenangan dalam pengelolaan Desa Wisata selama obyek utamanya merupakan Padruwen Desa Adat yang merupakan hak asal usul dan berskala lokal<sup>7</sup>. Padruwen Desa Adat merupakan seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil. Padruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil adalah sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu, sedangkan yang dimaksud Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil adalah wewidangan Desa Adat, tanah Desa Adat, sumber daya alam, sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat, kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat, bangunan-bangunan milik Desa Adat, benda-benda yang bersifat religius magis, keuangan dan sarwa mulé; dan harta kekayaan materiil lainnya.

Pengelolaan obyek wisata Taman Mumbul oleh Desa Adat juga meliputi pengelolaan hasil atau pendapatan dalam pengelolaan obyek wisata Taman Mumbul. Pendapatan yang berasal dari pemungutan biaya tentang pemanfaatan lingkungan baik religi, sosial, budaya maupun ekonomis telah di atur oleh lembaga desa adat sangeh berdasarkan perarem desa. Pendapatan diperoleh dalam bentuk balas jasa pengelolaan obyek wisata dalam retribusi seperti parkir, pedagang, sewa toilet, sewa busana melukat, jasa penitipan barang, sumbangan

---

<sup>6</sup> Wulandari, A., & Adikampana, I. M. (2018). Pengelolaan Taman Mumbul Sebagai Daya Tarik Wisata Spiritual Di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 369

<sup>7</sup> Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68

sukarela dari warga yang mengambil air minum, sesari dan punia pemedek, dan donatur dari paket wisata. Selain itu terdapat pula pendapatan dalam bentuk jasa kebersihan dalam pemanfaatan lingkungan seperti aktivitas lomba melukis, lomba burung, lomba memancing, prewedding, shooting film, dan lain sebagainya. Hasil yang di dapatkan tersebut sebagaimana digunakan untuk kepentingan usaha, baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan fasilitas maupun pengembangan dan pelestarian obyek wisata selanjutnya serta untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama seperti dalam pelaksanaan piodalan di pura-pura yang ada di lingkungan di desa sangeh dimana seluruh pembiayaan di keluarkan oleh desa adat<sup>8</sup>.

### **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan Desa Wisata**

Selain pendekatan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development paradigm*), pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata juga dilakukan melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism/CBT*). CBT adalah konsep pembangunan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut terlibat dalam proses penyusunan strategi, pelaksanaan, dan pemberian suara hingga membuat keputusan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial serta budaya<sup>9</sup>. CBT dianggap berpihak kepada masyarakat lokal, sebab pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri dan bertujuan untuk pemerataan akses perekonomian. Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tersebut dapat dikuatkan dan direalisasikan dengan kehadiran BUMDes yang memiliki struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana yang mampu menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan<sup>10</sup>. BUMDes adalah lembaga ekonomi dan sosial desa yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan memberikan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa<sup>11</sup>. Pembentukan BUMDes yang menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan pendapatan desa dan

---

<sup>8</sup> Arka, I. W. (2020). Potensi Sumber Mata Air Klebutan Sebagai Elemen Daya Tarik Wisata Religi Yang Berbasis Kerakyatan Dan Berkelanjutan Pada Obyek Wisata Taman Mumbul Di Desa Sangeh Kabupaten Badung. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2)

<sup>9</sup> Santoso, R. E. P. (2017). Peran Community Based Tourism Dalam Pengembangan Cultural Tourism Berkesinambungan. *Arthavidya Jurnal Ekonomi*, 17(2), 53-58, h. 54

<sup>10</sup> Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 565-585

<sup>11</sup> Revida, E., Purba, S., Faza, I., Yendrianof, D., Syafrizal, S., Pratiwi, I. I., ... & Hendrayani, Y. (2022). *Tata Kelola Bumdes Dalam Pengembangan Desa Wisata*. Yayasan Kita Menulis



masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

Peran BUMDes dalam melakukan pengelolaan sektor pariwisata di desa tidak bisa dilepaskan dari kewenangan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa dimana desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengurus urusan pemerintahannya dan memiliki kewenangan dalam mengelola potensi desa serta memberdayakan masyarakat desa. Desa dapat mengelola sebesar-besarnya potensi wisata yang dimiliki, pengelolaan yang dilakukan dapat berupa pengelolaan daya tarik wisata, mempersiapkan sarana dan prasarana wisata hingga menyediakan jasa pariwisata. Desa mengatur pengelolaan tersebut dengan membuat aturan pengelolaan wisata yang dituangkan melalui peraturan desa, merancang program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, serta mempersiapkan badan pengelola seperti BUMDes. BUMDes ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan memiliki AD/ART dimana kedua hal tersebut memberikan kewenangan dan legalitas kepada BUMDes dalam mengelola unit usaha wisata serta mengatur pendirian dan teknis pelaksanaan BUMDes. Namun demikian dari 455 BUMDes yang telah terbentuk sampai Tahun 2018 di Bali, hanya terdapat 13 unit pengelolaan obyek wisata, hal ini cukup rendah dibandingkan dengan unit usaha simpan pinjam yang paling banyak berkembang<sup>12</sup> dan sekaligus menunjukkan pengelolaan sektor wisata pada desa di Bali melalui BUMDes masih terbatas ditengah maraknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa di Bali.

Ditengah keterbatasan tersebut, terdapat sebuah desa yang mampu mengelola sektor pariwisatanya melalui BUMDes dan telah memiliki prestasi sebagai pengelola dana desa terbaik di tingkat nasional Tahun 2017 serta dijadikan sebagai rujukan untuk membangun BUMDes dan sebagai percontohan terkait laporan keuangan, desa tersebut adalah Desa Paksebali di Kabupaten Klungkung, Bali<sup>13</sup>. BUMDes Pakse Bali unggul di bidang pengelolaan pariwisata dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan:

- a. memperhatikan jenis sektor wisata seperti wisata alam (daya tarik wisata kali unda, perbukitan dan wisata tracking), budaya (pemelukatan pada pura taman seganing, melukat geni di puri satria kawan, tradisi dewa masraman dan tari barong) dan jasa pariwisata (jasa akomodasi penginapan menggunakan salah satu rumah warga sebagai homestay);
- b. modal yang berasal dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat desa, dana desa dan perbankan (BNI);

---

<sup>12</sup> Citta Maya. (2018, Januari 27). Angkat Perekonomian Desa, BUMDes Fokus di Simpan Pinjam. Bali Post. Diakses pada <http://www.balipost.com/news/2018/01/27/35732/AngkatPerekonomian-Desa,BUMDes-Jangan...html>

<sup>13</sup> Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 565-585

- c. pengelola yang merupakan warga Desa Pakse Bali dengan usia maksimal 60 tahun atau lebih selama warga tersebut masih mampu untuk berkontribusi dan Pendidikan minimal SLTP/SMP untuk pengelola unit usaha;
- d. pola pengelolaan yang dibantu Pokdarwis dan keterlibatan Pemda Propinsi dan Kabupaten;
- e. strategi pemasaran yang menggunakan sosial media baik itu website, facebook dan Instagram serta bekerja sama dengan organisasi pariwisata, diantaranya *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)* dan *Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)*;
- f. pertanggungjawaban dengan penyampaian laporan setiap bulan, enam bulan dan setiap tahun kepada Pemda Provinsi dan Kabupaten serta pertanggungjawaban dan transparansi ke masyarakat desa melalui rapat banjar; dan
- g. pembagian hasil secara efektif dan terstruktur (Hasil keuntungan pada pengelolaan pariwisata rata-rata dapat mencapai 15-20 juta perbulan dan jika digabungkan dengan hasil-hasil dari unit usaha yang lain maka rata-rata penghasilan mencapai 100 juta pertahun).

Selain itu BUMDes Pakse Bali juga menjalin kerjasama dengan akademisi dan beberapa perguruan tinggi (Unud, STPBI, STIKES Bali, dan Undiksha) serta BUMDes di desa lain untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan sektor pariwisata. Upaya dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes juga telah direncanakan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dalam hal membayar tagihan listrik, pemberian air gratis dan pemberian sembako serta pembiayaan upacara keagamaan Puja Wali di Desa Pakse Bali, sehingga masyarakat dapat terbantu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa, diharapkan masyarakat dapat merasa memiliki BUMDes itu sendiri, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes juga akan semakin meningkat.

Selain kemajuan pengelolaan pariwisata oleh BUMDes Pakse Bali, upaya yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Silalahi II Kabupaten Dairi Sumatera Utara, yang termasuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022, dalam meningkatkan kunjungan wisatawan juga dapat menjadi contoh dalam pengelolaan desa wisata. Upaya yang dilakukan oleh BUMDes di desa wisata Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan diawali dengan pemetaan produk yang berbasis pada konsep produk inti dan produk penunjang seperti wisata alam (air terjun siringo, bonarest camping ground and fishing, pantai bintang pemula, dan kayak tour), wisata budaya (pemandian deang namora) dan wisata buatan (dermaga wisata silahahi) serta pemetaan pasar wisata dimana berdasarkan data selama tahun 2015-2020 kunjungan didominasi oleh wisatawan nusantara yang diikuti dengan formulasi strategi yaitu target potensial destinasi pariwisata dan strategi pengembangan produk pariwisata, Customer Management serta

Marketing Management dan selanjutnya melakukan implementasi yang menghasilkan<sup>14</sup>:

- a. Produk Homestay desa wisata yang dikelola oleh BUMDes bersama pokdarwis, dimana jumlah homestay pada tahun 2015 sebanyak 20 unit bertambah menjadi 40 unit di tahun 2020 karena keikutsertaan dan kolaborasi stakeholder dari komunitas, bantuan pemerintah dan pelatihan dari akademisi;
- b. Pengembangan Customer Management menggunakan konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) melalui keterlibatan Pokdarwis antara lain dalam pengelolaan homestay;
- c. Pengembangan Marketing Management dengan penggunaan teknologi digital dalam industri pariwisata dan konsep *The Rising of Sharing Economy* dengan saling berbagi dalam memanfaatkan aset/resources melalui pemanfaatan platform sharing/marketplace seperti TripAdvisor atau ctrip.com (untuk melihat/menjelajahi lokasi wisata), booking.com dan traveloka.com (untuk memesan) serta Alipay dan paypal (untuk membayar);
- d. Menghubungkan supply dan demand antara lain dengan meletakkan produk homestay melalui platform *Indonesia Tourism Exchange (ITX)* yang merupakan platform sharing economy yang berperan mengintegrasikan ekosistem pariwisata secara digital sekaligus dapat menjangkau pasar global dalam rangka mendongkrak *Market Size*.

Meningkatkan kunjungan wisata merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan desa wisata yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa, upaya lain adalah mengoptimalkan potensi yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan baik potensi wisata alam, budaya, buatan maupun kuliner. Seperti halnya Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah yang merupakan desa terkaya dengan pendapatan 16 miliar rupiah setahun karena obyek wisata Umbul Ponggoknya<sup>15</sup>. Desa Ponggok merupakan salah satu desa wisata yang dikembangkan menjadi desa wisata air mengingat melimpahnya potensi air di wilayah desa ini, proses terbentuknya Desa Wisata Ponggok berawal dari terdapatnya umbul atau pemandian mata air di Desa Ponggok yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan tim selam, tim SAR, dan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pemetaan dan penggalan potensi dan dijadikan sebagai wisata. Hingga pada tahun 2009 pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri yang selanjutnya mengelola Desa Wisata Ponggok sampai saat ini. Adapun peran BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok yaitu<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup> Panggabean, D., Tondang, B., & Wiharjokusumo, P. (2022). Analisis Efektivitas Bumdes Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Melalui Model Pentahelix Di Desa Wisata Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi. *Jurnal Creative Agung*, 12(1), 71-80

<sup>15</sup> Ib, Humas Jateng. (2019, Januari 8). Keren, Desa Ponggok yang Makin Canggih. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada <https://jatengprov.go.id/publik/keren-desaponggok-yang-makin-canggih/>

<sup>16</sup> Hastutik, D. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten

**Peran penyadaran (*conscientization*)**

Melalui pemberdayaan, sosialisasi dan juga dengan memberikan bukti hasil kerja. Peran penyadaran juga mendukung pengembangan Desa Wisata Ponggok yang berkelanjutan antara lain:

1. **Berkelanjutan secara ekonomi**  
Penyediaan lapangan kerja seperti menjadi karyawan BUMDes, karyawan unit usaha BUMDes, dan tukang parkir atau juga dapat masuk dalam kelompok UMKM yang dibentuk oleh tim PKK. BUMDes Tirta Mandiri juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Ponggok untuk berdagang di sekitar lokasi wisata dengan menyewa kios yang sudah disediakan oleh BUMDes dengan harga sewa antara 2,5 juta – 3 juta per tahun tergantung luasan area kios
2. **Berkelanjutan secara sosial-budaya**  
Adanya gotong-royong yang rutin dilaksanakan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan BUMDes bersama dengan pemerintah desa melalui pengelolaan PAD yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk beasiswa satu rumah satu mahasiswa, BPJS, dan undian umroh untuk masyarakat Desa Ponggok. Budaya tradisional yang masih ada di Desa Ponggok yaitu suran, sadranan, dan padusan.
3. **Berkelanjutan secara lingkungan**  
Kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap hari Jumat (Jumat bersih), menerapkan pemisahan sampah organik dan anorganik, Desa Ponggok juga mendukung kegiatan Indonesia mengurangi sampah plastic yang dilakukan dengan memberikan tarif kepada pembeli yang berbelanja di Toko Desa apabila ingin menggunakan kantong plastik sebagai wadah belanjannya.

**Peran pengorganisasian masyarakat (*community organizing*)**

Dalam bentuk kegiatan penyaluran aspirasi secara langsung melalui pertemuan, mengunjungi langsung kantor BUMDes dan media sosial serta dalam bentuk pembagian unit usaha di BUMDes Tirta Mandiri (unit wisata Umbul Ponggok, unit wisata Ponggok Ciblon, unit toko desa, dan PLT unit gedung dan study desa) sehingga menjadikan koordinasi lebih mudah dan dapat mengoptimalkan kerja bagi karyawan, karena akan lebih berfokus pada unit yang mereka tangani.

**Peran penghantaran sumber daya manusia (*resource delivery*)**

Dengan melakukan kegiatan pelatihan sumber daya manusia secara mandiri maupun menggandeng pihak lain seperti BNI terkait pelayanan, STAN terkait administrasi dan keuangan dan pihak akademisi lainnya. Selain pelatihan, kegiatan penghantaran sumber daya manusia sudah dilakukan sejak sistem perekrutan dimana perekrutan menggunakan berbagai tes dan syarat tertentu serta diutamakan adalah warga Ponggok sendiri.

**Kolaborasi kinerja desa adat dan peran BUMDes dalam menjalankan Program wisata terpadu Taman Mumbul**

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa pengelolaan obyek wisata taman mumbul sepenuhnya dilakukan oleh desa adat melalui pengelola taman mumbul, desa adat sangeh memiliki peran yang signifikan dalam penyiapan fasilitas, pengembangan daya Tarik wisata melalui program-program dan

terobosan serta melaksanakan pendistribusian pendapatan yang diperoleh. Di lain pihak, pada Tahun 2018 pemerintah desa sangeh telah mendirikan BUMDes yang dinamakan BUMDes Pala Guna Sari yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya, namun BUMDes Pala Guna Sari belum memiliki unit usaha yang mengelola wisata dan baru bergerak di bidang simpan pinjam<sup>17</sup>.

Pengelolaan oleh desa adat semata dengan memberdayakan masyarakat belum dapat mengoptimalkan pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai harapan, masih terdapat kendala yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran, seperti untuk melakukan perawatan atau penambahan fasilitas, karena selama ini hanya bersumber dari pendapatan atas pengelolaan obyek wisata taman mumbul dan anggaran desa adat<sup>18</sup>. Untuk itu diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar entitas yang berwenang melakukan pengelolaan wisata di desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Desa Adat Sangeh dan BUMDes Pala Guna Sari. Desa adat dibutuhkan mengingat adanya keterikatan psikologis antara masyarakat sangeh dengan keberadaan desa adat sangeh tersebut dan tidak bisa dipisahkan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung atau ada tidak ada pariwisata, desa adat sangeh akan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sangeh. Keterikatan tersebut diharapkan akan meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat. Sedangkan peran BUMDes dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan potensi wisata yang efektif, adanya struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana pada BUMDes yang bersumber dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat desa serta dana desa mampu menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu kehadiran BUMDes dapat membantu menguatkan dan merealisasikan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Untuk mewujudkan kolaborasi kinerja desa adat dan peran BUMDes dalam pengelolaan obyek wisata taman mumbul, perlu dimulai keterlibatan BUMDes yang telah didirikan oleh desa sangeh melalui pembentukan unit usaha yang menangani wisata khususnya taman mumbul dengan kepengurusan yang dapat diambil dari pengelola taman mumbul saat ini. Selain itu dalam menjalankan program wisata terpadu taman mumbul dan dalam menghadapi tantangan perkembangan pariwisata khususnya di Bali di masa mendatang, perlu dilakukan upaya bersama oleh desa adat sangeh dan BUMDes Pala Guna Sari yang mengadopsi strategi terbaik yang telah dilakukan oleh BUMDes di desa wisata yang telah sukses baik di Bali maupun di luar Bali, antara lain:

1. Melakukan pemetaan produk dan pasar wisata serta penggalian potensi yang dimiliki oleh obyek wisata taman mumbul sehingga dapat menghasilkan sebuah produk unggulan (baik wisata alam, budaya, buatan, jasa pariwisata

---

<sup>17</sup> <https://desasangeh.badungkab.go.id/berita/29958-bumdesa-pala-guna-sari-sangeh-membangun-ekonomi-masyarakat-menengah-ke-bawah>

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan pengelola taman mumbul

- termasuk atraksi wisata) yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar pariwisata saat ini dan perkembangannya dimasa mendatang;
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam mengelola dan memperluas jangkuan pemasaran obyek wisata taman mumbul termasuk produknya dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital terintegrasi yang mencakup pencarian, pemesanan sampai dengan pembayaran (*look – book – pay*);
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat terhadap tujuan pendirian BUMDes dan potensi yang dimiliki oleh taman mumbul baik melalui pemberdayaan, sosialisasi maupun bukti nyata atau hasil, sehingga akan diperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan obyek wisata taman mumbul yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan;
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola sehingga mampu mengembangkan sektor pariwisata dengan lebih baik melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan oleh akademisi, perguruan tinggi, pihak swasta maupun pemerintah secara berkala;
  5. Menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan obyek wisata oleh BUMDes secara periodik kepada pemerintah daerah dan khususnya kepada masyarakat desa sebagai wujud transparansi dan informasi terhadap perkembangan BUMDes serta evaluasi untuk perbaikan kedepannya.

Selain kolaborasi dan sinergitas desa adat dan BUMDes, dalam menjalankan dan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut diperlukan peran serta stakeholder yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media yang tergabung dalam model pentahelix. Dengan adanya kemitraan strategis antara desa adat, BUMDes dan para stakeholder yang tergabung dalam pentahelix yang didasari asas saling percaya, keterbukaan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan maka pengembangan pariwisata taman mumbul akan menjadi lebih optimal dan dapat berjalan secara berkelanjutan.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Saat ini terdapat dua entitas yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan untuk dapat mengelola obyek wisata taman mumbul. Pertama adalah desa adat sangeh yang sampai saat ini sudah berperan secara signifikan dalam melakukan pengelolaan melalui pembentukan pengelola taman mumbul dan yang kedua adalah BUMDes Pala Guna Sari yang dibentuk oleh desa sangeh namun sampai saat ini belum memiliki unit usaha wisata khususnya yang melakukan pengelolaan terhadap taman mumbul. Kedua entitas tersebut memiliki perannya masing-masing baik yang berkaitan dengan masyarakat adat sangeh maupun yang memiliki struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana yang dapat membantu menguatkan dan merealisasikan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dilain pihak pengelolaan yang dilakukan saat ini oleh satu entitas saja yaitu desa adat masih menemui kendala khususnya dalam hal ketersediaan anggaran. Untuk itu perlu adanya kolaborasi kinerja desa adat dan peran BUMDes dalam pengelolaan obyek wisata taman mumbul untuk

menjalankan program wisata terpadu taman mumbul dengan mengadopsi strategi terbaik yang telah dilakukan dengan sukses oleh BUMDes di desa wisata baik di Bali maupun di luar Bali. Selain itu diperlukan adanya kemitraan strategis antara desa adat, BUMDes dan para stakeholder yang tergabung dalam pentahelix yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media yang didasari asas saling percaya, keterbukaan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan sehingga pengembangan pariwisata taman mumbul akan menjadi lebih optimal dan dapat berjalan secara berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. BUMDes Pala Guna Sari yang telah didirikan oleh desa sangeh agar dapat lebih berperan aktif dengan membentuk unit usaha wisata yang akan melakukan pengelolaan taman mumbul dimana kepengurusannya dapat mengambil kepengurusan pengelola taman mumbul saat ini, hal ini sekaligus sebagai langkah awal dalam mewujudkan kolaborasi kinerja desa adat dan peran BUMDes dalam menjalankan wisata terpadu taman mumbul. Inti dari kepengurusan ini mewajibkan adanya program kerja yang jelas, transparan dan mengacu pada peningkatan pendapatan serta efek domino yang ditimbulkan bagi masyarakat di sekitarnya.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat setempat terhadap tujuan pendirian BUMDes, potensi yang dimiliki oleh taman mumbul dan kolaborasi desa adat dengan BUMDes. Masyarakat diharapkan berperan serta secara aktif untuk turut menjadi bagian dari pengelolaan Taman Mumbul ini, sehingga regenerasi kepengurusan dan masyarakat yang berpotensi bakat dan kemampuannya dapat disalurkan kepada kinerja BUMDes;
- c. Melibatkan atau mengorganisasikan masyarakat dalam unit-unit usaha BUMDes yang telah ada atau akan dibentuk sebagai upaya penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat sesuai konsep pariwisata berbasis masyarakat. Akan ada divisi-divisi usaha yang terintegritas, sehingga nilai wisata Taman Mumbul diharapkan selalu meningkat tiap tahunnya;
- d. Melakukan kerjasama/kemitraan strategis dengan stakeholder akademisi, bisnis dan masyarakat untuk memetakan dan menggali potensi wisata taman mumbul yang akan menjadi produk unggulan. Dengan melibatkan banyak pihak, BUMDes diharapkan memiliki konsentrasi untuk produk unggulan yang bersifat riil, memiliki legalitas, dan persyaratan lainnya seperti halnya kelayakan komersialisasi suatu produk unggulan;
- e. Melakukan kerjasama/kemitraan strategis dengan stakeholder akademisi dan pemerintah untuk melakukan pelatihan, pendampingan dan pembinaan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan obyek wisata taman mumbul. Tidak menutup kemungkinan sinergitas ini dapat memiliki keluasaan dan jangkauan usaha yang lebih tinggi lagi dari yang ada selama ini;
- f. Merevitalisasi dan memperbaharui pengelolaan media sosial yang telah dimiliki secara terpadu dan konsisten (website, instagram, facebook, twitter,

dll) serta memasukkan potensi wisata termasuk produk unggulan yang ada di taman mumbul kedalam platform digital terintegrasi yang mencakup pencarian (tripadvisor.com atau ctrip.com), pemesanan (tiket.com, booking.com, traveloka, agoda dll) sampai dengan pembayaran (ovo, gopay dan *digital payment/finance* lainnya) untuk memperluas jangkauan pemasaran dan menghubungkan *supply* dengan *demand*. Dasar dari saran ini adalah melakukan integritas management digital berbasis kekuatan informasi, sehingga mampu membuat nilai-nilai strategis antara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di lingkungan desa sangeh;

- g. Melakukan kerjasama/kemitraan dengan media, komunitas dan organisasi pariwisata (ASITA atau HPI) dalam rangka pengelolaan promosi dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek wisata taman mumbul. Kegiatan yang spesifik untuk mengangkat *image* wisata alam berbasis kegiatan ritual yang sangat memperhatikan nilai keseimbangan alam dan asas nilai umat Hindu Bali melalui TRI HITA KIRANA, selain itu kegiatan berupa *event* nasional ataupun internasional yang melibatkan peran keseluruhan sangat disarankan menjadi kegiatan riil yang mampu memberikan rating bagi kunjungan wisatawan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Melalui tulisan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar, Rektor Universitas Ngurah Rai, Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai dan Ketua Program Studi Magister Admnistrasi Publik Universitas Ngurah Rai yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian juga kepada masyarakat dan Desa Adat Sangeh beserta seluruh pengurus yang terlibat serta pengelola Taman Mumbul pada khususnya yang telah memberikan tempat dan fasilitas untuk pelaksanaan program PKM, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln. (2009). Handbook of Qualitative Research, Pustaka Pelajar, Hal. 422.
- Mirshad, Z. (2014). Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi. Surabaya: Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Santoso, R. E. P. (2017). Peran Community Based Tourism Dalam Pengembangan Cultural Tourism Berkesinambungan. Arthavidya Jurnal Ekonomi, 17(2), 53-58, h. 54.
- Desasangeh. (2018, April 24). Bumdesa Pala Guna Sari Sangeh Membangun Ekonomi Masyarakat Menengah Ke Bawah. Diakses pada <https://desasangeh.badungkab.go.id/berita/29958-bumdesa-pala-guna-sari-sangeh-membangun-ekonomi-masyarakat-menengah-ke-bawah>
- Citta Maya. (2018, Januari 27). Angkat Perekonomian Desa, BUMDes Fokus di Simpan Pinjam. Bali Post. Diakses pada



- [http://www.balipost.com/news/2018/01/27/35732/Angkat Perekonomian-Desa,BUMDes-Jangan...html](http://www.balipost.com/news/2018/01/27/35732/Angkat-Perekonomian-Desa,BUMDes-Jangan...html)
- Beoang, D. D., & Suryasih, I. A. (2018). Identifikasi Potensi Desa Wisata Sangeh, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2).
- Wulandari, A., & Adikampana, I. M. (2018). Pengelolaan Taman Mumbul Sebagai Daya Tarik Wisata Spiritual Di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 369.
- Humas Setkab. (2019, Juni 24). Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa. Diakses pada <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>
- Ib, Humas Jateng. (2019, Januari 8). Keren, Desa Ponggok yang Makin Canggih. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada <https://jatengprov.go.id/publik/keren-desa-ponggok-yang-makin-canggih/>
- Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.
- Hastutik, D. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
- Arka, I. W. (2020). Potensi Sumber Mata Air Klebutan Sebagai Elemen Daya Tarik Wisata Religi Yang Berbasis Kerakyatan Dan Berkelanjutan Pada Obyek Wisata Taman Mumbul Di Desa Sangeh Kabupaten Badung. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2).
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 565-585.
- Revida, E., Purba, S., Faza, I., Yendrianof, D., Syafrizal, S., Pratiwi, I. I., ... & Hendrayani, Y. (2022). Tata Kelola Bumdes Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Yayasan Kita Menulis*.
- Panggabean, D., Tondang, B., & Wiharjokusumo, P. (2022). Analisis Efektivitas Bumdes Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Melalui Model Pentahelix Di Desa Wisata Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi. *Jurnal Creative Agung*, 12(1), 71-80.